

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PAILIT OLEH PEKERJA PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES
(Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**JULIO MANGATAS NUGRA
NIM 145010100111009**



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 26 Juli 2018

Yang menyatakan,

JULIO MANGATAS NUGRA
NIM : 145010100111009



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan;
4. Seluruh keluarga besar penulis terutama kedua orang tua saya, Mama (Serephina Nainggolan), Papa (Jhon L Tambunan) yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan baik secara moril maupun materil, dan menghibur penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi;
5. Kepada Holi (Goldie Swarovski Pangaribuan) yang telah senantiasa menemani penulis pada saat susah ataupun senang . Ditunggu RX300t nya!
6. Keluarga besar Fakultas Hukum 2014
7. ALSA LC UB yang telah menjadi rumah kedua penulis selama kuliah terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman berorganisasi yang telah diberikan;
8. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah , Devani , Dimas , Dino , Culil, Fidya ,Justin, Mia , Nasya, Vidi, Putsep , Aduy, Doni(10), Oci, Sarah , Hawin, Temi, Yuke dan Vanya
9. Teman-teman penulis Ajax , Jeremia , Jordi , Acen , Garry , Evan, NS , Monic DLL1

RINGKASAN

Julio Mangatas Nugra, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT OLEH PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Studi Putusan No.04/pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.pst) Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., Dr.Reka Dewantara SH., MH.

Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan penolakan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaiannya pertimbangan hakim terhadap kedudukan pegawai dalam permohonan pailit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap keabsahan hukum pegawai dalam melakukan permohonan pailit kepada PT.Merpati Nusantara Airlines Nusantara telah sesuai dengan dasar UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Apakah penyelesaian hukum atas belum dibayarkannya upah pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dapat melalui pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui penerapan norma-norma dan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.

Berdasarkan pembahasan, Hasil menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan penolakan permohonan pailit PT.Merpati Nusantara Airlines tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUK dan PKPU.Hal ini karena syarat atas terpenuhinya unsur utang telah memberikan kekuatan hukum tetap atas keabsahan kedudukan pegawai sebagai kreditor dalam melakukan permohonan pailit. Untuk pekerja itu sendiri, diperlukannya putusan oleh pengadilan hubungan industrial sebagai bukti otentik atas telah jatuh temponya utang dan dapat ditagihnya utang kepada perusahaan tersebut.

SUMMARY

Julio Mangatas Nugra ,Civil Business Law, Faculty of law University of Brawijaya ,July 2018, JURIDICAL ANALYSIS of the JUDGE'S REASONING AGAINST the PETITION in BANKRUPTCY by WORKERS who EXPERIENCED ANY TERMINATION of EMPLOYMENT RELATIONSHIPS in PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (study of Ruling No. 04/pdt. SUS-Bankruptcy/2016/PN Jkt pst.). Dr. Budi Santoso, sh., LL. M., Dr. Reka Dewantara Sh., MH.

In this research, the author raised the issue regarding the conformity of the basic consideration of the judge in a ruling of the rejection in bankruptcy against PT Merpati Nusantara Airlines with the provisions of Act No. 37 of the year 2004. The theme options effected by ketidaksesuiannya considerations the judge against the position of clerk in the petition for bankruptcy.

Based on the above, the authors raised the issue of whether the formulation of the basic consideration of the judges against the validity of the law officers in conducting petition in bankruptcy to PT. Merpati Nusantara Airlines Archipelago were in accordance with the Basic Act No. 37 Year 2004 about bankruptcy and settlement law and whether the PKPU over yet dibayarkannya the wages of employees of PT Merpati Nusantara Airlines may be through simple proofs based on Article 8 paragraph (4) of ACT No. 37 Year 2004 about bankruptcy and PKPU.

This thesis writing using the method of normative-juridical approach to legislation and conceptual approach. The approach of legislation is done by examining the laws and regulations relating to the legal issues that are being examined and conceptual approach aims to study and find out the application of the norms and refers to principles of law that are found in the views on law degree or legal doctrines.

Based on the discussion, the results showed that the basic consideration of the judge's verdict in the denial of the petition for bankruptcy of PT. Merpati Nusantara Airlines is not fully in accordance with the provisions of UUK and PKPU. This is because the terms of the above satisfy the debt element have given the force of law remain top of the validity of the employee's position as a creditor in the bankruptcy petition is doing. And for workers themselves, it needs a court ruling by industrial relations as authentic evidence above has maturity of debt and can ditagihnya to the company's debt.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
<i>Summary</i>	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Kepailitan	14
1. Pengertian Kepailitan	14
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Kepailitan	15
3. Asas dalam Hukum Kepailitan	16
4. Macam-macam Kreditor	17
B. Persyaratan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU	19
C. Akibat Hukum dari Pernyataan Pailit	20
D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Ketenagakerjaan	22
E. Hak-hak Normatif Pekerja	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	41
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F. Kerangka Konseptual	42

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst.	46
1. Para Pemohon	46
2. Posita Pemohon	48
3. Ringkasan Putusan	49
B. Kedudukan Hukum dari Pegawai PT.Merpati Airlines dalam Kasus Permohonan Pailit PT.Merpati Airlines	51

C. Penyelesaian Hukum atas Belum Dibayarkannya Upah Pegawai PT.Merpati Nusantara Airlines Melalui Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	7
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan dunia bisnis merupakan salah satu nyawa dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Apabila suatu bisnis dapat dikelola dengan baik, maka para pihak terkait dapat menerima keuntungan yang sangat besar daripadanya dan pada akhirnya negara juga akan menerima keuntungan ini. Kegiatan bisnis ini dalam bentuk yang besar dan akan melibatkan banyak pihak dalam keberlangsungannya, biasanya dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas (yang selanjutnya disebut PT). Demi keberlangsungannya dalam kancah dunia perekonomian, suatu PT membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal ini biasanya didapatkan dari para investor dan juga melalui pinjaman kepada para kreditur. Bagi para investor dan kreditur sendiri terdapat berbagai macam keuntungan serta risiko apabila mereka memutuskan untuk terlibat dalam suatu usaha. Selain investor dan kreditur, pihak lain yang juga terlibat di dalam dunia usaha ini adalah debitur serta pemegang saham.

Namun, dalam menjalankan suatu usaha di dalam dunia bisnis, ada kalanya kehidupan bisnis berada di bagian bawah roda perjalanannya, di mana kegiatan usaha tersebut mengalami suatu masalah. Acapkali keadaan keuangan suatu perusahaan sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya (*insolvabel*). Hal ini tidak hanya dapat terjadi pada suatu perusahaan, namun dapat juga terjadi pada orang-perorangan yang menjalankan suatu kegiatan usaha. Keadaan inilah yang disebut dengan pailit.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai UUKPKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹ Kemudian, sebelum diajukan atau pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap debitor, dapat diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang yang tujuannya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang pada kreditor.

Kehidupan suatu perusahaan dapat saja berada pada kondisi yang mengalami untung maupun mengalami rugi. Hal ini kemudian juga dapat mengakibatkan perusahaan yang mengalami pailit ini harus keluar dari dunia usaha. Dalam keadaan seperti ini, pihak debitor dapat mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga terkait agar dapat dilakukan pemberesan terhadap harta pailit yang sesuai baik bagi pihak debitor itu sendiri maupun bagi pihak kreditor terkait. Namun, tidak jarang juga kreditor yang merasa terancam kepentingannya kemudian mengajukan agar debitor dinyatakan pailit agar ia mendapatkan pelunasan piutangnya karena debitor terakut enggan untuk membayarkan utangnya tersebut.

Adapun menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai

¹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Ps. 1 ayat (1).

penagih terhadap asset seorang Debitur yang tidak cukup nilainya².Kemudian, menurut Jerry Hoff dalam buku Kartini Muljadi setelah diterjemahkan menyatakan bahwa tujuan adanya kepailitan ini adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.³

Di dalam UUKPKPU, terdapat dua pihak yang berkorelasi di pengadilan niaga. Pertama, adalah kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kedua adalah debitor, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁴.

Adapun yang menjadi pokok yang disengketakan baik oleh debitor maupun kreditur adalah utang. Utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁵

Menurut Jerry Hoff utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya

² Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeni,S.H. “**Sejarah, Asas, dan teori Hukum Kepailitan dalam Epstein**,David G., Steve H.Nickles., James J. White,Bankruptcy,St.Paul ,Minn: West Publishing Co,1993;Radin,Max “The Nature of Bankruptcy”

³ Jerry Hoff, **Hukum Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)**, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi,(Jakarta: Tata Nusa, 2000), hlm. 66

⁴ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Ps. 1 ayat (2)& (3).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Ps. 1 ayat (6).

perjanjian utang piutang (dimana Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.⁶

Di dalam pembuktian pada perkara kepailitan, pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yaitu pembuktiannya harus secara sederhana. Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian permohonan kepailitan. Hal itu ada kaitannya dengan pembatasan waktu dalam UU kepailitan yang sekarang berlaku yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (5) UU kepailitan yaitu Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Maksud dari pembuktian sederhana pada Pasal 8 ayat (4) adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan apabila terdapat perbedaan besarnya jumlah atau nominal utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Setelah adanya putusan tersebut maka kurator akan melakukan rapat dengan kreditor untuk mencari nominal absolut atas utang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam

⁶ Jerry Hoff, *Op.Cit.*, hlm 15

menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan dianutnya asas Pembuktian Sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu, "cepat" dapat tercapai.

Pada putusan perkara Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst. Sudiyarto sebagai pemohon merupakan mantan karyawan yang telah diberhentikan dengan hormat oleh termohon, dan pemohon akan diberikan sejumlah uang oleh Termohon untuk membayar biaya gaji dan rincian lainnya. Namun sampai permohonan pailit diajukan pada tanggal 10 Pebruari 2016, termohon belum juga memenuhi gajinya, padahal Pemohon sudah mensomasi sebanyak tiga kali. Kemudian, selain berhutang dengan pemohon, termohon juga berhutang pada 112 pekerja lainnya yang menjadi kreditur lain sebagai syarat pailit dalam perusahaan .Dengan itu, untuk melindungi kepentingan para pemohon dan kreditor, Pemohon mengajukan pailit dimulai dari tingkatan pengadilan niaga hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang memiliki sejumlah karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pengadilan umum. Dimana pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak, yang mana menangani perkara-perkara kepailitan dan PKPU , Hak kekayaan intelektual dan Lembaga penjamin simpanan. Sedangkan pengadilan hubungan industrial ialah pengadilan yang menangani perbedaan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Paparan diatas berkaitan erat dengan kasus antara Sudiyarto dan Jafar Tambunan yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO) berdasarkan Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst. dan telah mendapat pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 .Dalam putusannya , Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan Sudiyarto dan Jafar Tambunan yang bertindak sebagai mantan pekerja dan juga sebagai wali atas beberapa pegawai atas tidak dibayarnya upah pekerja oleh PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO). Yang dalam hal ini Hakim menolak dengan dasar bahwa hubungan antara pemohon dan termohon adalah hubungan industrial atau hubungan antara pengusaha dan buruh atau pekerja atau serikat buruh , bukan sebagai Debitor dan Kreditor sehingga seharusnya diajukan kepada pengadilan hubungan industrial dan bukan pengadilan niaga.

Dengan demikian, terdapat permasalahan antara pertimbangan hakim Majelis Hakim Kasus PT. Merpati Airlines tentang bagaimanakah status hukum *ex* pegawai PT. Merpati Airlines dalam menagih hak normatif yang menjadi utang melalui proses permohonan pailit dalam pengadilan niaga, berikut pembuktian didalamnya.

Penulis melihat bahwa kasus ini merupakan kasus dengan isu yang timbul dari berbagai segi, baik dari segi kompetensi peradilan, dan dari segi kepastian hukum atas perlindungan dan pemenuhan hak para kreditor yang merupakan karyawan atau pekerja dari perusahaan. Dengan ditolaknya permohonan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan permohonan kasasi oleh

Mahkamah Agung, ketidakpastian hukum atas perlindungan dan pemenuhan hak para pekerja/ buruh dalam mengupayakan hak-haknya merupakan suatu masalah yang dapat diuji.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk dilakukan pembahasan yang memfokuskan terhadap kepastian hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak milik pekerja / buruh yang menjadi salah satu kreditor , dengan melakukan Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh mantan pekerja PT Merpati Airlines.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2010	Tomy Satrya Pamungkas, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT.	1.Hak-hak normatif pekerja dalam hal perusahaannya pailit dalam peraturan perundang-undangan. 2.Analisa penerapan putusan pengadilan terhadap hak-hak	Skripsi ini menjelaskan terkait hak-hak pekerja PT.Dirgantara Indonesia dan penerapan putusan pengadilannya , sedangkan pada penelitian ini penulis menjelaskan terkait

				normatif pekerja dari perusahaan yang pailit	keabsahan pekerja PT.Merpati Airlines dalam melakukan permohonan pailit beserta pembuktiannya.
2.	2014	Ahmad Khudzaivi , Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)	1.Bagaimana penyelesaian hak pekerja dalam proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2.Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak pekerja dalam proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang	Skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian hak pekerja dalam perusahaan pailit dalam perspektif hukum islam , sedangkan dalam penulisan ini menggunakan penerapan dalam hukum kepailitan dan tidak menggunakan perspektif atau kajian hukum islam

				Ketenagakerjaan?	
3.	2017	Galuh Indraswari. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.	PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	1. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien? 2. Bagaimanakah tugas kurator setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga? 3. Kendala-kendala yuridis apakah	Skripsi ini menjelaskan terkait peranan curator dalam pemberesan harta pailit. Dimana salah satu peran pembagian tersebut ditujukan bagi pegawai yang berguna dalam penelitian ini dan menjadi factor pembeda dalam penelitian ini.

				yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus harta pailit?	
--	--	--	--	--	--

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas , dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap keabsahan hukum pekerja dalam melakukan permohonan pailit kepada PT.Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan dasar UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Apakah penyelesaian hukum atas belum dibayarkannya upah pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dapat melalui pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan ini meliputi :

1. Untuk menganalisis mengenai apakah UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengakomodir pegawai dalam untuk melakukan permohonan dan mendalilkan hak dan kewenangannya yang telah dijanjikan dan tidak diberikan oleh perusahaan .

2. Untuk menganalisis implementasi pembuktian sederhana yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar pertimbangan untuk mempercepat proses putusan kepailitan ,dan penyelesaian hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum didalamnya

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan masukan untuk pengembangan ilmu Hukum Kepailitan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut terkait hukum kepailitan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam perihal kepailitan dan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa lembaga kepailitan merupakan lembaga yang penting dalam kehidupan bisnis dan perekonomian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah/aparat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan mekanisme penerapan hukum hak-hak pekerja dalam hukum kepailitan di Indonesia.

b) Bagi Pegawai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan terhadap pekerja yang diberikan pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan yang memiliki utang.

c) Bagi Pegawai BUMN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap hak-hak ataupun kewajiban yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja dalam perusahaan BUMN.

d) Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Agar masyarakat peka terhadap permasalahan hukum serta mengerti bagaimana penyelesaiannya. Dan juga agar masyarakat yang akan dan atau ingin menggugat pengusaha atas utang pada dirinya.

SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun penulisan penelitian ini akan disusun menjadi 5 (lima) bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dan pokok permasalahan penulisan sebagai dasar dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kegunaan penulisan, dan juga sistematika penulisan terkait dengan data-data yang digunakan untuk menulis penelitian ini.

BAB II TINJAUAN MENGENAI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SERTA PROSES TERKAIT DALAM PKPU DAN KEPAILITAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kode Etik Profesi Kurator dan

Pengurus mengatur mengenai proses dalam PKPU hingga kepailitan dan hal yang harus dilakukan kurator dan pengurus dalam proses tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

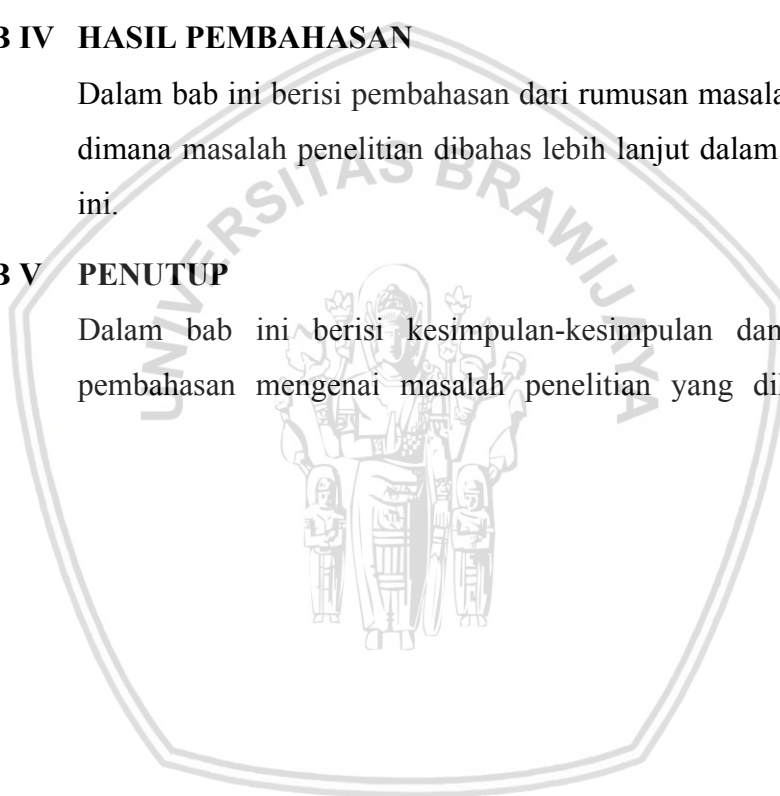
Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai masalah penelitian yang dikaji penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Dalam dunia usaha dapat terjadi suatu kondisi dimana seseorang atau suatu badan mengalami kesulitan atau berhenti membayar utang yang dimiliki kepada kreditornya. Terdapat beberapa cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.⁷

Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya terhadap kreditor, di mana hal ini disebabkan karena adanya kesulitan kondisi keuangan yang dialami oleh debitor dikarenakan usahanya mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang kemudian mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.⁸ Kepailitan dianggap sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari suatu permasalahan utang piutang yang dialami oleh debitor yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada kreditor.

Apabila debitor menyadari ketidakmampuannya untuk melunasi utang-utang yang dimiliki kepada kreditor dan kemudian debitor mengajukan permohonan dinyatakan pailit, maka hal ini disebut *voluntary petition for self bankruptcy*, namun apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang

⁷ Man. S. Sastrawidjaja, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 1

⁸ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.

sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor dan pengadilan menetapkan status pailit terhadap debitor ini, maka hal ini disebut *involuntary petition for bankruptcy*.⁹

2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Kepailitan

Lembaga kepailitan diharapkan dapat menjadi lembaga yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Lembaga kepailitan ini juga diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang dengan menggunakan berbagai cara memaksa debitor untuk melunasi utang-utangnya.¹⁰

Keberadaan dari hukum kepailitan ini memiliki tujuan dalam mengatur perekonomian, khususnya terhadap suatu peristiwa kepailitan. Sutan Remy menyimpulkan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah¹¹:

- a. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor bagi para kreditornya;
- b. mencegah debitor untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
- c. memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dan para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

⁹ Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan” dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 55-56

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), dalam Peter Mahmud, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm. 22

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 28

3. Asas dalam Hukum Kepailitan

Kepailitan di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur pada Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun, Undang-Undang ini menganut asas:¹²

- a. *Asas Keseimbangan*, dimana undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
- b. *Asas Kelangsungan Usaha*, dimana dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
- c. *Asas Keadilan*, dimana asas ini mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

¹² Indonesia, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N. Tahun 2004 No. 134. T.L.N. 4443 Penjelasan Umum Alinea 8.

- d. *Asas Integrasi*, dimana sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Macam-macam Kreditor

Pada dasarnya, para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak eksekusi harta kepailitan sesuai dengan besar tagihan masing-masing (pari passu pro rata parte). Namun atas demikian mengenal pengecualian yaitu terhadap kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan terhadap golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan.

Menurut Pasal 1 butir 2 UU KPKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Selanjutnya, kreditor dapat digolongkan sesuai tingkatan kedudukan dalam perkara kepailitan menjadi:

a) Kreditor Separatis :

Merupakan kreditor emegang hak jaminan kebendaan (meliputi:pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek) yang dapat bertindak sendiri. Hak penting yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk menjual/mengeksekusi sendiri objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi).¹³

¹³ Kartini Muljadi, **Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta : 2005, hlm 168.

b) Kreditor Preferen :

Merupakan kreditor yang semata-mata karena sifat utangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu oleh undang-undang. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Salah satu contohnya adalah utang pajak yang terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 1137 KUHPerdara, dan untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara

c) Kreditor Konkuren:

Merupakan Kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

B. Persyaratan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU

Undang-Undang Kepailitan memberikan preferensi mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU dalam hal kepailitan suatu perusahaan. Dalam melakukan permohonan pengajuan kepailitan terhadap orang-perorangan maupun suatu badan hukum, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut. Adapun, bunyi dari pasal ini yakni sebagai berikut:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor pailit adalah:¹⁴

- 1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- 3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

¹⁴ Sjahdeini, **Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 52

Terdapat perbedaan di antara utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya akan menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Hal ini dikarenakan utang hanya jatuh waktu apabila menurut perjanjian utang-piutang telah sampai waktu untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian terkait.¹⁵

C. Akibat Hukum dari Pernyataan Pailit

Suatu pernyataan pailit pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, terutama bagi debitor, dan juga bagi harta pailit. Akibat hukum yang timbul dari putusan pernyataan pailit itu adalah:

- a. Putusan Pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta)

Undang-Undang Kepailitan mengandung unsur “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” (*uit voorbaar bij voorrad*) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.”

Maksud dari putusan pailit bersifat serta-merta adalah bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini terdapat suatu upaya hukum yang sedang ditempuh dan akibat putusan pailit *mutatis mutandis* berlaku. Hal ini dikarenakan kepailitan merupakan alat

¹⁵ Sjahdeini, **Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 57-59

untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitor untuk digunakan sebagai pelunasan atas utang-utangnya.¹⁶

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harta kekayaan debitor yang masuk ke dalam harta pailit dan segala yang diperoleh debitor selama kepailitan merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*).

c. Kehilangan wewenang dalam harta kepailitan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*). Kehilangan hak ini hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak termasuk hak perdata lainnya serta haknya sebagai warga negara.

d. Perikatan setelah Pailit

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, segala perikatan debitor yang terbit setelah adanya putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali apabila perikatan dapat menguntungkan harta pailit.

Perlu diingat bahwa harta kekayaan debitor harus didistribusikan kepada kreditor dengan maksud untuk melunasi utang debitor dan keberadaan dua atau lebih kreditor merupakan syarat untuk dapat memohonkan pernyataan pailit terhadap seorang debitor. Dengan demikian, apabila pemohon pailit

¹⁶ Shubhan, **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 163

mendalilkan bahwa dia sebagai kreditor dari debitor pailit dan kreditor lainnya masih akan ada di kemudian hari, maka relevansi kepailitan menjadi tidak ada.¹⁷

e. Pembayaran Piutang Debitor Pailit

Menurut Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor pailit tidak memiliki hak untuk menerima pembayaran piutang dan untuk mengurus segala tuntutan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan harta kekayaan sebab hal ini merupakan tugas dan kewenangan kurator.

Selama kepailitan berlangsung, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan pada debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sementara tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor, sejauh itu bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor.¹⁸

D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Ketenagakerjaan

a. Pengertian Hubungan Industrial

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai apa itu yang dinamakan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah

¹⁷ Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166

¹⁸ Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 167

yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Beberapa definisi tentang hubungan industrial juga dikemukakan oleh: ¹⁹

1. Dr. Payaman J. Simanjuntak APU : hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis anatar pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian pembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.
2. Drs. Yunus Shamad, M.M., bahwa hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
3. Muzni Tambuzai, menyatakan bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola hubungan interaktif yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah) dalam suatu hubungan kerja.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi

¹⁹ Supomo Suparman, S.H., **Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3

menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan (Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Pekerja/buruh dan serikat perja/buruhnya dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilannya dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Adapun pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang. Nomor 13 Tahun 2003) serta dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga perjanjian kerja bersama.

Hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tersebut terkadang dilanggar oleh salah satu pihak, maka timbullah perselisihan atau persengketaan, yang mana perselisihan ini disebut perselisihan hubungan industrial atau sengketa perburuhan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dapat menuntut hak tersebut, yang mana dalam menuntut hak tersebut diperlukan tata cara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tata cara inilah yang disebut hukum acara.

Hukum acara juga disebut hukum formil. Hukum itu secara umum dibagi 2 (dua) yaitu hukum materiil dan hukum formil (acara). Hukum materiil adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur apa-apa saja yang menjadi atau yang merupakan hak-hak dan kewajiban- kewajiban seseorang. Contohnya hukum materiil dalam hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Siapa saja yang melanggar ketentuan hukum materiil akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur di undang-undang bersangkutan. Cara untuk memberi sanksi, menuntut hak-hak bagi pelanggar ketentuan hukum materiil adalah dengan cara yang telah diatur didalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang mengatur cara-cara tersebut dinamakan hukum formil atau hukum acara.

Jadi, hukum acara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan, mempertahankan hak-hak dan kewajiban.

b. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI)). Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu ²⁰:

²⁰ Ugo, Pujiyo, **Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.27-48.

1. Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat 2 UUPPHI). Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H., perselisihan hak (*rechtsgeschil*) adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu ataupun menyalahi ketentuan hukum. Berdasarkan pengertian diatas, maka perselisihan hak merupakan suatu kejadian di mana hak salah satu pihak yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tidak didapatkannya. Oleh sebab itu, maka pihak yang haknya dilanggar itu berhak untuk menuntut terhadap pihak yang merugikan, dengan alasan berdasarkan perselisihan hak.

2. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat- syarat kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 ayat 3 UUPPHI). Menurut Prof. Iman Soepomo, S.H., perselisihan kepentingan adalah mengenai usaha mengadakan perubahan dalam syarat-syarat perburuhan, biasanya perbaikan syarat perburuhan, yang oleh organisasi buruh dituntutkan kepada majikan.²¹

²¹ *ibid*, hlm. 33.

Berdasarkan pengertian diatas, maka perselisihan kepentingan adalah perselisihan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 ayat 4 UUPPHI). Jadi perselisihan PHK itu timbul setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut. dengan kata lain, setelah adanya PHK maka timbullah perselisihan yaitu perselisihan PHK. Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan PHK dan besaran kompensasi atas PHK. jenis perselisihan PHK ini adalah jenis perselisihan yang banyak terjadi di dalam praktir ketenagakerjaan.

4. Perselisihan antar- Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya pesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerja.

c. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) telah memberikan suatu cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam hubungan antara

pekerja dengan pengusaha atau lebih dikenal dengan sebutan hubungan industrial. Penyelesaian tersebut telah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap perselisihan dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih dari 140 hari, hal ini termasuk cepat bila dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya.

Waktu yang tidak lebih dari 140 hari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut adalah sebagai berikut: bipartit 30 hari kerja, mediasi/konsiliasi/arbitrase 30 hari kerja pengadilan hubungan industrial 50 hari kerja dan Mahkamah Agung 30 hari kerja. Jadi, meskipun penyelesaian perselisihan ini hanya diselesaikan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung sekalipun hanya akan membutuhkan waktu 140 hari kerja²². Bahkan bisa hanya dalam waktu kurang dari 30 hari kerja apabila perselisihan dapat selesai dalam perundingan bipartit saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama yaitu melalui Perundingan Bipartit. Merupakan perundingan antara pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 ayat 10 UUPPHI) . Selanjutnya, Pasal 3 menentukan bahwa perselisihan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian yang terbaik sesungguhnya adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sendiri (bipartit), sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui

²² *Ibid.* hlm. 53

musyawarah mufakat oleh para pihak, tanpa campur tangan oleh pihak mana pun. Namun demikian, apabila para pihak gagal/tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha.

Yang mana para pihak yang berselisih telah

disediakan 3 (tiga) pilihan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, yaitu:

1. mediasi hubungan industrial,
2. konsiliasi hubungan industrial, dan
3. arbitrase hubungan industrial.

Pilihan para pihak yang berselisih tentunya harus memperhatikan kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut, karena tidak semua lembaga tersebut berwenang menyelesaikan semua perselisihan dalam hubungan industrial, ada lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah PHK, ada juga lembaga yang tidak berwenang menyelesaikan masalah PHK, dan lain-lain.

2. Tahap Kedua Penyelesaian di luar Pengadilan. Merupakan Mediasi atau Konsiliasi atau Arbitrase.

Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut media penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Konsiliasi hubungan industrial selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan,

perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final.

3. Tahap Ketiga: Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam UUPPHI (Pasal 57 UUPPHI). Dengan ketentuan tersebut berarti bahwa para pihak yang akan menuntut keadilan pada Penyelesaian Hubungan Industrial harus berpedoman pada hukum acara perdata pada peradilan umum, hanya sedikit yang diatur secara khusus dalam UUPPHI. Hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri bagi para buruh/pekerja yang akan menuntut keadilan, karena harus membuat surat gugatan yang tidak mudah, dan lagi harus berhadapan di persidangan melawan pengusaha yang jelas mampu untuk membayar advokat, hukum acara yang berlaku pada perselisihan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali diatur secara khusus. Ketentuan normatif hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, sumber hukumnya masih bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat beracara di

perselisihan hubungan industrial dapat digunakan sumber hukum acara sebagai berikut.²³

- Peraturan Umum:

1. HIR (Herziene Indonesisch Reglement), yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura;
2. RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
3. BW (Burgerlijke Wetboek voor Indonesia) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya tentang Pembuktian;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kali dengan UU No. 49 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 kemudian diubah untuk kedua kali dengan UU No. 3 Tahun 2009;
7. Yurisprudensi.

- Peraturan Khusus:

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).

Seluruh peraturan perundang-undangan diatas akan saling mengisi untuk digunakan sebagai pedoman berperkara di pengadilan hubungan industrial. Hanya beberapa saja yang diatur secara khusus dalam UUPPHI, antara lain tentang

²³ Ugo dan Pugiyo. **Hukum Acara Penyelesaian Hubungan Industrial**. 2011.hlm. 94

waktu yang dibatasi, biaya perkara yang gratis (disubsidi negara), adanya hakim Ad-Hoc.

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui oleh tergugat (Pasal 85). Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim Ad-Hoc tersebut terdiri atas seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha. Sehubungan dengan itu, dalam pemeriksaan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat 2 cara dalam proses pemeriksaan dengan acara biasa dan acara cepat terhadap sengketa perselisihan hubungan industrial.²⁴

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial tidak mengatur secara lengkap mengenai ketentuan Pasal 57 yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan

²⁴ Lalu Husni, **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 99 .

Industrial adalah ukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian, terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang PHI, sedangkan terhadap hal-hal yang belum diatur berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata yakni HIR/Rbg. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis iakim harus sudah melakukan sidang pertama (Pasal 89 ayat 1).

Oleh karena itu, Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir (Pasal 89 ayat 2). Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kelurahan atau kepala Desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil atau tempat kediaman yang terakhir Pasal 89 ayat 3). Penerimaan surat panggilan oleh pihak yang dipanggil sendiri atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan (Pasal 89 ayat 4). Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan Perselisihan Industrial yang memeriksanya (Pasal 89 ayat 5).

Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya (Pasal 90 ayat 1). Barang siapa yang diminta keterangannya oleh Majelis Hakim guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan (Pasal 91 ayat 1).

Sehubungan dengan itu, salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya (Pasal 93 ayat 1). Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan (Pasal 93 ayat 2). Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan (Pasal 93 ayat 3), penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada hari sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 3, maka gugatan dianggap gugur. Namun penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi (Pasal 94 ayat 1). Dalam hal pihak tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat (Pasal 94 ayat 2).

Selanjutnya, sidang majelis hakim terbuka untuk umum. Ini berarti setiap orang boleh mengikuti jalannya persidangan sebagai wujud fungsi kontrol sosial terhadap jalannya persidangan dilaksanakan. Apabila para pihak sebelumnya tidak menguasai kepada seorang wakil, dimuka sidang pertama tersebut mereka dapat menguasai secara lisan kepada seorang wakil, hal ini harus dicatat dalam berita acara sidang

Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). apabila berhasil didamaikan, hakim dapat memberikan putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai yang sesungguhnya merupakan persetujuan, sehingga bersifat final. Jika para pihak tidak berhasil didamaikan barulah dimulai dengan pembacaan surat gugatan (Pasal 131 ayat 1, 155 ayat 1 Rbg). Dalam hukum acara peradilan hubungan industrial, dimungkinkan pada sidang pertama, bilamana nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai tindakan skorsing bagi buruh/pekerja yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, Hakim Ketua sidang menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh (Pasal 96 ayat 1).

2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pasal 98 ayat (1) mengenai Kepentingan Para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat (Pasal 98 ayat 1). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak

dikabulkannya permohonannya tersebut (Pasal 98 ayat 2). Terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan (Pasal 99 ayat 1). Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat ini dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Sedangkan untuk penyelesaian pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama.

E. Hak-Hak Normatif Pegawai

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dengan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli. Antara penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Antara keduanya mempunyai kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. Kedudukan antara pengusaha

dengan pekerja adalah tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas.²⁵

Pada hakikatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataannya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabaur).

Buruh dipandang sebagai objek. Buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup²⁶:

1. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

²⁵ Abdul Khakim, 2003, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 6.

²⁶ Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, 1982, **Pokok –pokok perburuhan**, cet I, (Bandung: Armico), hlm 43-44.

2. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
3. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
4. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan melakukan studi kepustakaan atau biasa juga disebut sebagai *library research*, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya dengan analisis yuridis permohonan pailit oleh pegawai perusahaan ini.

B. Pendekatan Penelitian

a. Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.²⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-

²⁷ Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93.

prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁹ yakni doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai dalam perusahaan sebagai pihak yang memiliki hak yang telah jatuh tempo dan memiliki kewenangan untuk menagih dan menyelesaikannya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan kombinasi antara bahan hukum primer³⁰, sekunder³¹, dan tersier³², sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

²⁹ Dyah Octorina Susanti, A'aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.155.

³⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm:52 menyatakan bahwa, "bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat."

³¹ *Ibid.*, dinyatakan bahwa, "bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer."

³² *Ibid.*, dinyatakan bahwa, "bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sumber sekunder."

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi bahan penelitian dari bahan hukum primer seperti, literature-literatur hukum, jurnal hukum baik yang online maupun tidak, kamus hukum dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis, antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber dan bahan hukum yang berkaitan dan sebagai penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut akan didapat dari:

1. Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
3. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Akses Internet

Sebagai penunjang pada studi kepustakaan, penulis juga menggunakan bahan hukum yang bersumber dari internet sebagai penunjang literature-literatur yang ada pada studi kepustakaan seperti jurnal hukum dari website resmi badan hukum maupun penelitian-penelitian hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Pada penelitian normatif, tidak dibutuhkan data-data dari lapangan untuk di

analisis. Pada penelitian yuridis normatif, semua pengumpulan dan pengolahan data harus dibuat secara sistematis yang dimana membuat klasifikasi pada bahan hukum tertulis guna mempermudah kegiatan analisis dan konstruksi.³³

Cara yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan menggunakan metode analisis interpretasi yakni dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, literature-literatur maupun situs-situs terpercaya yang ada di internet yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum tersebut.

Metode interpretasi yang digunakan, antara lain:

1. Interpretasi Bahasa atau Gramatikal

Interpretasi bahasa atau gramatikal yaitu suatu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ditafsirkan dengan cara mengacu pada arti perkataan menurut tata bahasa.³⁴

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum yang ada sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dan mengerti apa yang dimaksud pasal per pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini, terdapat beberapa konsep khusus yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu penelitian yang bersifat konkret yang perlu dijelaskan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan mempermudah

³³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 35.

³⁴ C.S.T. Kancil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm. 36

dalam memahami konsep-konsep tersebut dan permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini. Hal ini juga diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan interpretasi dalam menafsirkan tulisan ini. Dengan demikian, terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu:

1. Kepailitan

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKPKPU"), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berhak menangani permohonan pernyataan pailit. Posisinya berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri, persisnya di bawah bagian pengadilan kasus perdata.

3. Debitur (*debtor*)

Orang yang berutang kepada orang lain, orang yang harus melunasi utangnya, orang yang harus bertanggung jawab terhadap suatu tuntutan. Menurut pasal 1 ayat (3) UUKPKPU, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Kreditur

Menurut pasal 1 ayat (2) UUKPKPU, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

5. Utang (*debt*)

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) UUKPKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

6. Pembuktian Sederhana

Menurut pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

7. Pekerja/buruh

Menurut pasal 1 angka 9 UU no 2 tahun 2004, Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8. Pengusaha

Menurut pasal 1 angka 7 UU no 2 tahun 2004, Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.



BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst

1. Para Pemohon

Dalam permohonan pailit yang diajukan kepada PT Merpati Airlines dalam pengadilan niaga, terdapat dua pihak yang menjadi pemohon dalam permohonan pailit yaitu Sudiyarto sebagai *ex* pegawai dan juga Jafar Tambunan sebagai pegawai PT Merpati Airlines.

PEMOHON I adalah Pegawai dari TERMOHON sejak bulan Agustus 1996 (PI-1) dan diberhentikan dengan hormat oleh TERMOHON sejak tanggal 17 Juli 2014 (PI-2) dimana Pemohon I akan diberikan oleh Termohon uang sejumlah Rp. Rp. 406,674,590,- (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Hak Normatif (Gaji dari Desember 2013 sd Juli 2014, Denda Gaji Desember 2013 sd Mei 2014, Iuran Jamsostek beserta pengembangannya dari Tahun 2009 s/d 2014) dengan nilai sebesar Rp. 148,895,640,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan uang pesangon sebesar Rp. 257,778,950,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.406,674,590,- (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Namun sampai permohonan pailit ini diajukan, TERMOHON belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya TERMOHON memiliki Hutang kepada PEMOHON I sebesar Rp.406,674,590,- (empat ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat

ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Adapun kewajiban TERMOHON terhadap PEMOHON II karena adanya hubungan HUKUM dimana PEMOHON II adalah pegawai TERMOHON dimana PEMOHON II diangkat sebagai pegawai sejak tahun 1990 .PEMOHON II akan diberikan oleh TERMOHON uang sejumlah Rp. 431,941,709,- (empat ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Hak Normatif (Gaji dari Desember 2013 sd Juli 2014, Denda Gaji Desember 2013 sd Mei 2014, Iuran Jamsostek beserta pengembangannya dari Tahun 2009 sd 2014) dengan nilai sebesar Rp. 141,881,609,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan rupiah) ditambah dengan uang pesangon sebesar Rp. 290,060,100,- (dua ratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu seratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 431,941,709,-. (empat ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) Namun sampai permohonan pailit ini diajukan, TERMOHON belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya TERMOHON memiliki Hutang kepada PEMOHON II sebesar Rp.431,941,709,- (empat ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah)

Baik pihak pertama dan pihak kedua telah memberikan perintah atau peringatan (Surat Teguran) yaitu somasi kepada PT Merpati Airlines dimana PEMOHON I meminta haknya terhadap Pihak TERMOHON dan Pihak TERMOHON tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya sehingga melalui Kuasa Hukum PEMOHON I pada tanggal 15 Januari 2016 mengajukan

SOMASI agar TERMOHON segera membayarkan Hak PEMOHON I yang dilanjutkan dengan SOMASI ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016 juga tidak dilakukan pembayaran sehingga dilanjutkan dengan SOMASI ke-3 (ketiga) agar Hutang TERMOHON dibayarkan ke PEMOHON I dan pada tanggal 31 Januari 2016 PEMOHON I mengirimkan lagi Penagihan Hutang kepada TERMOHON dan PEMOHON II meminta haknya terhadap Pihak TERMOHON dan Pihak TERMOHON tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya sehingga melalui Kuasa PEMOHON II pada tanggal 15 Januari 2016 mengajukan SOMASI agar TERMOHON segera membayarkan Hak PEMOHON II yang dilanjutkan dengan SOMASI ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016 juga tidak dilakukan pembayaran sehingga dilanjutkan dengan SOMASI ke-3 (ketiga) agar Hutang TERMOHON dibayarkan ke PEMOHON II dan pada tanggal 30 Januari 2016 PEMOHON II mengirimkan lagi Penagihan Hutang kepada TERMOHON sebesar Rp.431.941.709,- (empat ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) tetapi TERMOHON tetap tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah jatuh tempo.

Disamping Pemohon , termohon juga memiliki utang kepada pegawai lainnya sebanyak 112 karyawan yang tidak berposisi sebagai pemohon dengan total utang sebesar Rp.71.515.826,750 .

2. Posita Pemohon

Dalam posita pemohon, pemohon menyebutkan bahwa kewajiban termohon untuk membayar hak normatif yang berupa gaji , denda gaji dan iuran jamsostek adalah utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (6) UU No.37 2004. Bahwa tagihan yang telah dilakukan oleh pemohon dilakukan

dengan mengirimkan SOMASI ke-1 (kesatu) kepada TERMOHON pada tanggal 15 Januari 2016, SOMASI ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016, SOMASI ke-3 (ketiga) pada tanggal 02 Februari 2016 dan Surat Tagihan pada tanggal 31 Januari 2016, namun TERMOHON masih tidak membayar juga malahan TERMOHON melalui kuasa hukumnya memberi jawaban melalui surat jawaban somasi ke-3 (ketiga) No. 0T1/ADCO/RD/11/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang antara lain mengatakan bahwa "apabila saudara akan mengajukan permohonan PAILIT yang dapat membawa terlambatnya pencairan dana penyelesaian Hak-hak Normatif seluruh Karyawan Merpati maka TERMOHON akan menempuh segala langkah Hukum baik Pidana maupun Perdata" yang merupakan ancaman dan intimidasi dari termohon kepada para pemohon padahal jelas termohon yang tidak membayar hutangnya kepada para pemohon .Selanjutnya disebutkan tentang adanya utang pegawai lainnya sebanyak 112 orang sebagai kreditor yang tidak ikut dalam permohonan kepailitan. Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut , PT Merpati Airlines menolak dan membantah bahwa permasalahan hukum antara pemohon pailit dan termohon pailit demi hukum masuk kedalam ranah perselisihan industrial bukan pengadilan niaga . Sehingga disini mempertanyakan kepada penulis kapasitas/keabsahan hukum yang dimiliki pegawai dalam pengadilan niaga.

3. Ringkasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat dalam Putusannya No.04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2016 menyatakan

bahwa Menolah permohonan para pemohon dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian hubungan pemohon dengan termohon adalah hubungan industrial atau hubungan antara pengusaha dengan buruh atau pekerja atau serikat buruh. Dengan demikian sengketa antara pengusaha dan buruh tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan niaga . bahwa dengan memperhatikan sengketa antara pemohon dan termohon yang mempersoalkan tentang diberhentikannya pemohon dan dimana hak-hak Pemohon tidak dibayarkan gaji , denda gaji , iuran jamsostek dan lain-lain.Maka hubungan tersebut jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis berpendapat dengan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan didalam pasal 1 angka 22 berisi : Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaa atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serika buruh karena adanya perselisihan mengenai hak. Perselisihan kepentingan, dan perselisian pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerna/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

B. Kedudukan Hukum dari Pegawai PT.Merpati Airlines dalam kasus permohonan pailit PT.Merpati Airlines.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Penetapan hakim dilakukan apabila adanya suatu keadaan di mana seseorang atau badan hukum (debitur) sampai pada suatu kondisi tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini utang-utangnya kepada si pemberi utang (kreditur).

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan , pailit atau *Bankrupt* adalah :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari pengertian di atas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi pengertian kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Debitor;
- b. Terdapat 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- c. Adanya utang;
- d. Jatuh tempo dan dapat ditagih

Atas dasar keabsahan pemenuhan keempat unsur kepailitan diatas, untuk itu penulis akan mengelaborasi elemen-elemen diatas sebagai dasar pertimbangan kedudukan hukum pegawai PT.Merpati Airlines sebagai berikut:

a) Penjabaran Pemenuhan Adanya Utang

Berdasarkan unsur-unsur diatas maka salah satu unsur yang paling fundamental dalam permohonan kepailitan adalah utang. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa yang dimaksud utang dalam UUK adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep utang ini merupakan konsep utang dalam arti luas. jadi segala bentuk prestasi yang belum terbayar oleh debitor merupakan utang yang bisa diajukan permohonan pailit .

Sehubungan dengan pengeritan utang di dalam Undang-undang Kepailitan, menurut **jerry hoff** dalam bukunya "*Indonesian bankruptcy law*", Utang seyogianya diberi arti luas ; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitur harus membayar sejumlah uang tertentu . Dengan perkataan lain , yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit , tetapi juga kewajiban Debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.

Sehingga dapat disimpulkan secara luas menurut UUKPKPU dan diperluas oleh **jerry joff**, utang adalah kewajiban dari debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul karena adanya pemenuhan perjanjian atau undang-

undang dan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya . Hal ini berarti bahwa setiap wanprestasi dan bahkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigdaad*) dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Namun dalam hal kepailitan, utang memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Utang tersebut telah jatuh tempo;
2. Utang tersebut dapat ditagih; dan
3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan; atau terdapat hal-hal lain dimana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih menggunakan “acceleration clause atau acceleration provision” atau percepatan jatuh tempo dan default clause. Setiawan membedakan Acceleration clause dengan *default clause* . *Acceleration clause* memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang , jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deems itself insecure*), oleh karena itu acceleration clause lebih luas daripada default clause yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo. Kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi event of default, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo .Selanjutnya setiawan mengatakan bahwa untuk menggunakan acceleration clause harus disertai adanya

good faith. Adapun yang dimaksud dengan good faith adalah adanya reasonable evidence , dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan pengadilan.³⁵

Di dalam dalilnya, pegawai PT Merpati Airlines menyatakan bahwa PT Merpati Airlines telah tidak membayar upah atau gaji pemohon pertama selama 8 bulan terhitung sejak desember 2014 bulan. Seharusnya, secara normatif, fakta ini dapat dijadikan sebagai dasar dari eksistensi hutang PT. Merpati Airlines berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU Kepailitan dan PKPU. Dan dengan itu unsur akan utang dalam permohonan kepailitan sudah terpenuhi.

b) Penjabaran Pemenuhan Adanya Debitor

Elaborasi lebih lanjut atas keempat unsur permohonan kepailitan diatas ialah para pihak, para pihak dalam permohonan kepailitan adalah debitur dan kreditur. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUKPKPU, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 2 UUKPKPU kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sehubungan dengan kasus kepailitan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjadi termohon dan sebagai Debitor adalah PT.Merpati Airlines. Sedangkan yang menjadi pihak pemohon adalah Sudyarto dan Jafar tambunan yang dalam kasus ini bersama dengan 112 pihak lainnya sebagai kreditor.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

³⁵ Setiawan, *Op.Cit.*, hlm.124

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dan dapat di elaborasi bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Debitor Paling Sedikit Memiliki Dua Kreditor .Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) ketentuan Pasal 1132 KUHPdata bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.
- b) Debitor Paling Sedikit Tidak Membayar Satu Utang Kepada Salah Satu Kreditor Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.
- c) Utang yang Belum Dibayar Telah Jatuh Waktu dan Sudah Dapat Ditagih Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunyan untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

c) Penjabaran Adanya 2 Kreditor

Penekanan adanya minimal dua kreditor dalam pasal 2 ayat (1) UUK ini memberikan makna bahwa kepailitan merupakan pranata untuk melakukan penyelesaian utang debitor terhadap beberapa kreditor karena jika hanya memiliki satu kreditor saja, maka kepailitan akan kehilangan maknanya sebagai *collective proceeding tool*. Atas dasar pemenuhan makna dasar tersebut melahirkan prinsip-prinsip dalam kepailitan.

Prinsip-prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai.³⁶ Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan peraturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya³⁷. Yang mana terdapat 3 prinsip dalam hukum kepailitan:

1. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.³⁸ Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah

³⁶ Y.Sogar Simamora (2005), "**Prinsip Hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah**", Disertasi, Pascasarjana, Unair, Surabaya, hlm.: 22-23

³⁷ *Ibid*, hlm:23.

³⁸ Mahadi(2003), **Falsafah hukum: Suatu Pengantar**, Alumn, Bandung, hlm:135

dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³⁹

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang halal ataupun tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.⁴⁰

Namun demikian, prinsip *paritas creditorium* kendatipun merupakan respons atas ketidakadilan tersebut, jika prinsip *paritas creditorium* diterapkan secara *letterlijk*, maka akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Prinsip *paritas creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar ataupun kreditor yang memiliki piutang

³⁹ Kartini Mulyadi 1, *Op.cit.*, hlm:168

⁴⁰ Kartini Muljadi (2000), "**Pengeritan dan prinsip-prinsip Umum Hukum kepailitan**", *Makalah*, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 3) .hlm.1-2

kecil, baik kreditor yang memegang jaminan ataupun kreditor yang tidak memegang jaminan.⁴¹

Dari ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* tersebut dalam pembahasan keabsahan hukum atas pegawai PT.Merpati Airlines .maka prinsip ini harus digandengkan dengan *prinsip pari passu prorata parte* dan *prinsip structured creditors*.

2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proposional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁴² Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya , maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar ,maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya

⁴¹ M.Hadi Shubhan, “**Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma,dan Praktik di Peradilan**”, Jakarta:Kencana ,2008 ,hlm.28

⁴² Kartini Mujadi (2001),”**Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga**”, h.300

tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan sendiri.

3. Prinsip Structured Creditors

Penggunaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip pari passu prorata parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Adapun prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing, dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu :

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferen;
3. Kreditor Konkuren.

Persyaratan adanya banyak kreditor inilah merupakan penormaann dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* tersebut.

Terlepas dari prinsip tersebut ,seperti diketahui bahwa pembagian dan pengelompokan terhadap kreditor dalam hukum perdata umum diatur dalam BW. Dalam hukum perdata umum membagi kreditor menjadi 2 macam yaitu :

1. Kreditor preferen yang lahir karena perjanjian (Pasal 1133, 1134 BW) dan kreditor preferen yang lahir karena Undang-Undang disebut privelege (Pasal 1139, 1149 BW)

2. Kreditor konkuren.(Pasal 1131, 1132 BW)

Sedangkan dalam klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam hukum kepailitan mengandung asas *structured creditors*. Yang dimana membagi macam kreditor menjadi 3 macam yaitu:

- a. Kreditor separatis , yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya;
- b. Kreditor preferen, yaitu berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;
- c. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing.

Perbedaan antara kreditor menurut UUK-PKPU dengan kreditor menurut BW adalah bahwa didalam hukum perdata umum dikenal dengan adanya kreditur preferen yang memiliki hak jaminan kebendaan(gadai dan hipotik) baik yang diatur dalam pasal 1133 dan pasal 1134 BW maupun diluar BW (fidusia , hak tanggungan) dan kreditor privilege yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya.Sedangkan, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, dikalsifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

Adapun macam-macam kreditor dalam kepailitan berdasarkan jenis pelunasan piutangnya maka tingkatan kreditur yang didahulukan pelunasannya dapat dikategorikan, sebagai berikut

- a. Kreditor Separatis

Adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Munir Fuady mengatakan bahwa separatis berkonotasi “perpisahan” hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.

Dalam BW pada Pasal 1134 ayat (2) diatur pula mengenai klasifikasi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik. Selebihnya jaminan-jaminan yang tidak diatur oleh BW diatur oleh Undang-undang tersendiri. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:

- Gadai (Pasal 1150 BW sampai dengan Pasal 1160 BW);
- Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah);
- Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 BW).

b. Kreditor Preferen

Adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang yang diberi kedudukan istimewa. Pada buku II BW terdapat bentuk – bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan namun mempunyai ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yaitu preferen. Preferen dalam kepailitan sama halnya dengan kreditor privilege dalam hukum perdata umum. Kreditor preferen bersifat aksesoir , beberapa ciri dari preferen:

1. Harus dituntut, artinya pemegang hak istimewa ini jika tinggal diam maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan harus menuntut agar dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkatan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang;
2. Preferen bukan hak kebendaan, pemilik hak tagihan istimewa tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak didahulukan;
3. Preferen ditentukan oleh undang-undang;
4. Preferen hanya melekat selama benda-benda tersebut masih berada ditangan debitor, ini menandakan bahwa hak istimewa bukan hak kebendaan;
5. Preferen berpindah kepada ahli waris kreditor.

Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus yaitu hak yang didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 BW, dan kreditor preferen umum preferen terhadap semua harta benda milik debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW.

c. Kreditur Konkuren

Adalah kreditor bersaing yang artinya bahwa kreditor konkuren tidak Kreditor tersebut bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pembayaran dari hasil lelang, sehingga keududukannya pun tidak diutamakan dalam pelunasan. Kreditor tersebut tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 *jo.* Pasal 1132 BW bahwa mereka tidak mempunyai preferensi dalam pelunasan piutang-piutangnya, dikarenakan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak diistimewakan dan atau bukan merupakan kreditor yang diperjanjikan sebelumnya. Sehingga piutang-piutang dari kreditor konkuren merupakan piutang yang masuk dalam boedel pailit apabila debitor dinyatakan pailit oleh para krediturnya. Serta pelunasannya pun harus menunggu dari hasil sisa pelunasan atau pelelangan harta pailit dan sisa pelunasan tersebut harus dibagikan setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

Berdasarkan macam-macam kreditor tersebut telah ditentukan tata urutan kreditor yang lebih didahulukan dalam kepailitan. Bahwa pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain. Sebagaimana sesuai Pasal 1134 ayat (2) BW menegaskan bahwa “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”. Sehingga atas penjelasan tersebut kreditor separatis dalam hal ini mendapatkan keutamaan dalam

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan.

Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitor yang memiliki banyak debitor dimana tanpa adanya kepailitan maka debitor akan saling berebut baik secara sah maupun yang tidaksecara sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap debitor itu sendiri maupun terhadap kreditor khususnya kreditor yang masuk belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian harta debitor untuk pembayaran.

Dengan penjabaran kepada macam-macam kreditur diatas , menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan/kapasitas hukum pegawai PT.Merpati Airlines dalam melakukan Permohonan pailit kepada PT.Merpati Airlines.Putusan No.04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Putusan hakim menolak permohonan pailit dengan dasar pertimbangan ialah hubungan antara pegawai PT.Merpati Airlines dengan PT.Merpati Airlines ialah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha , bukan hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Sehingga pegawai tidak memiliki kapasitas hukum dalam pengadilan niaga dan seharusnya melakukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial.

1. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013
Sebagai salah satu pertimbangan dalam keabsahan kedudukan
pegawai PT.Merpati Airlines

Dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 dikatakan bahwa kedudukan pegawai berada diatas kreditur separatis dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:
”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;
2. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;

Dengan dasar pertimbangan putusan MK tersebut menjelaskan bahwa pegawai memiliki kapasitas hukum dan keabsahan hukum menjadi kreditor , bahkan dalam pembagian boedel pailit , pegawai yang belum dibayarkan gajinya yang menjadi utang tersebut akan menjadi kreditor separatis bukan kreditor konkuren ataupun preferen.

2. Analisa Yuridis Putusan Pailit No.41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt (PT.Dirgantara Indonesia) sebagai komparasi pertimbangan hakim dalam putusan perkara Kepailitan

Adapun mengenai keabsahan hukum pegawai sebagai kreditor ditunjang dengan permohonan pailit pada tanggal 3 Juli 2007 yang diajukan oleh mantan karyawan PT.Dirgantara Indonesia yaitu Heryono , Nugroho ,dan Sayu. Dalam hal ini pemohon termasuk dari 6.561 pekerja pegawai PT.Dirgantara Indonesia yang memiliki utang hingga Rp 200 Miliar.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007 menyatakan bahwa Dirgantara pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan uraian pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Pailit memiliki kapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon Pailit, Dirgantara. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Berita Negara Republik Indonesia mengenai Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 Nomor 85 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menhukham**”), sesuai

dengan Keputusan Menhukham Nomor C- 04670.HT.01.04 tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia disingkat PT Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham Dirgantara adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat Termohon Pailit Dirgantara tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi dalam saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, sehingga dengan demikian Pemohon Pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Dirgantara.

Dalam ringkasan pertimbangan hakim dalam pengadilan tingkat pertama ini ,hakim memutuskan pailit terhadap PT.Dirgantara Indonesia. Dengan menyatakan bahwa mantan pegawai/ pekerja PT.Dirgantara Indonesia dianggap sebagai kreditor dan berhak memasuki ranah pengadilan niaga dalam menuntut utang atas tidak dibayarnya gaji terhadap karyawan.

Atas dasar pembahasan diatas , berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kepailitan , adanya utang dalam ranah kepailitan , putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, dan adanya pertimbangan hakim dalam putusan 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst . Yang dimana dalam memenuhi Prinsip

Structured Creditors dimana pegawai sebagai kreditur separatis sesuai dengan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Dan berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut muncul ketidaktaatan hakim dalam penerapan norma dan prinsip dalam kepailitan. Dalam hal ini implikasi yuridisnya adalah pekerja memiliki keabsahan / kapasitas hukum dalam melakukan permohonan pailit dalam pengadilan niaga apabila debitor yakni perusahaan dalam hal ini memiliki utang. Dan terkhusus dalam kasus Merpati , bahwa pegawai dapat mengajukannya dalam pengadilan niaga sebagai hubungan antara debitor dan kreditor , bukan sebagai pegawai/karyawan dengan pengusaha.

C. Penyelesaian hukum atas belum dibayarkannya upah pegawai PT. Merpati Airlines melalui pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.

Dalam permohonan pailit terhadap PT.Merpati Airlines , telah terbukti adanya utang terhadap 114 pegawai,pun permohonan dilakukan oleh 2 orang pemohon. Sebelum dilakukannya permohonan kepailitan tersebut , pemohon telah melakukan somasi yang mana SOMASI ke-1 (kesatu) kepada TERMOHON pada tanggal 15 Januari 2016, SOMASI ke-2 (kedua) pada tanggal 25 Januari 2016, SOMASI ke-3 (ketiga) pada tanggal 02 Februari 2016 dan Surat Tagihan pada tanggal 31 Januari 2016.

Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitor berprestasi atas suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPer data dengan bunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya

sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Atas dasar somasi tersebut telah membuktikan bahwa sebenarnya terdapat utang yang telah dapat ditagih karena terdapat kata-kata lalai dengan lewatnya waktu, dan telah memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat 1 yang merupakan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Namun dalam proses pemutusan pailit dalam pengadilan niaga yang memiliki urgensi yang harus putus dengan *time limit* selama 60 hari sejak permohonan pailit sesuai dengan pasal 8 ayat 5 UUKPKPU .Dengan itu diperlukannya pembuktian secara sederhana sesuai dengan pasal 8 ayat 4 yang berisikan :

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Dengan adanya somasi tersebut dan tidak adanya pembayaran sama sekali oleh PT.Merpati Airlines tersebut apakah terdapat fakta yang kuat dalam menyatakan bahwa utang yang merupakan hak normatif dari pegawai tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Maka selanjutnya terhadap ketentuan pasal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isi ketentuannya :

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang

yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Dalam Permohonan pailit antara pegawai dengan PT.Merpati Airlines ini merupakan utang yang lahir atas upah yang tidak dibayarkan kepada pegawai tersebut. Dan terdapat adanya sengketa antara kedua belah pihak apakah upah tersebut sudah menjadi utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih atau tidak.

Berkaca dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst , dimana permohonan pailit terhadap PT.Dirgantara Indonesia juga dilakukan oleh pegawai .Dalam posita pemohon , pemohon memasukkan pertimbangan terkait utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan adanya putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4) No:142 /03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan amar putusan P4 pusat menyebutkan bahwa: PT Dirgantara Indonesia wajib memberikan kompensasi pension dengan mendasarkan pada upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang.

Utang dalam permohonan pailit pegawai Merpati Airlines lahir dari adanya upah yang belum dibayarkan yang merupakan hak normatif dari pegawai. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (“UUK”), upah adalah hak pekerja yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.

Oleh karena upah merupakan termasuk hak pekerja, maka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah termasuk perselisihan hak. Perselisihan hak termasuk jenis perselisihan hubungan industrial. Mengenai

penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam UU no 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (pasal 55 Undang-Undang No 2 Tahun 2004). Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial disebutkan dalam pasal 56 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, yakni Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
- d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 3 ayat [1] UU 2/2004). Apabila dengan cara perundingan bipartit tidak menyelesaikan perselisihan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat bahwa telah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak berhasil (Pasal 4 ayat [1] UU 2/2004).

Setelah menerima pencatatan, instansi ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase (Pasal 4 ayat [3] UU 2/2004). Jika pekerja dan pengusaha tidak memilih proses konsiliasi atau arbitrase, maka instansi ketenagakerjaan akan menyerahkan kepada mediator. Apabila proses ini juga

tidak berhasil, barulah salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (Pasal 55 UU 2/2004). Untuk perkara perselisihan hak, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus untuk tingkat pertama (Pasal 56 huruf a UU 2/2004).

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja (Pasal 81 UU 2/2004). Apabila Gugatan melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus (Pasal 84 UU 2/2004).

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi (Pasal 108 jo. Pasal 110 UU 2/2004).

Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Mahkamah Agung melalui hasil Rakernas Mahkamah Agung bulan September 2002 dan menurut putusan (Yurisprudensi) memiliki pemaknaan atau penafsiran berbeda tentang maksud “sederhana” dengan makna sesuai metode penafsiran menurut ilmu hukum, dimana menurut Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Niaga bahwa yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “proses pembuktiannya (kata kerja/verb)”, sedang makna jelas sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “fakta atau keadaan (kata benda/noun)”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa/harfiah, makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau sebelumnya dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, asalkan dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah “fakta atau keadaan”, yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih Kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit. Fakta atau keadaan tersebut dalam tata bahasa disebut “kata benda atau noun”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengadilan niaga adalah memutus permohonan pailit dengan ketentuan bahwa telah terdapat 1 debitur dan lebih dari 2 kreditor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih. Yang mana utang tersebut tidak dapat disengketakan dalam bentuk apapun baik jatuh temponya ataupun dalam proses permohonannya.

Hal tersebut ditunjang oleh Pasal 127 ayat (1) :

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) disebutkan :

“Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”

Dari isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUKPKPU dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara berkaitan dengan perkara permohonan pailit apabila hakim pengawas memerintahkan kepada pihak yang bersengketa tentang piutang (Kurator dan kreditur) untuk diselesaikannya lewat Pengadilan Negeri tentang adanya bantahan terhadap piutang dalam proses pencocokan piutang.

Pengadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan perkara dan ruang lingkup antara pemohon dan termohon. Untuk perselisihan sengketa pada perdata umumnya akan disesuaikan dengan media pengadilan negeri dilanjutkan dalam pengadilan tinggi ataupun kasasi, dan untuk adanya perselisihan hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam hal upah maka akan lebih tepat diselesaikan dalam ketenagakerjaan dengan media pengadilan hubungan industrial.

Dalam permohonan pailit oleh pegawai PT.Merpati Airlines . berkaca dari pertimbangan dan adanya putusan permohonan pegawai PT.Dirgantara diatas , maka pegawai PT.Merpati Airlines tersebut harus melakukan upaya hukum sebelum ataupun sampai dengan pengadilan hubungan industrial untuk mendapat

putusan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4) yang memutuskan bahwa utang PT.Merpati Airlines tersebut telah jatuh tempo.

Apabila telah adanya putusan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4) terkait upah tersebut telah jatuh tempo dan tidak ada sengketa, dengan itu pegawai PT.Merpati Airlines dapat mengajukan permohonan pailit dalam pengadilan niaga. Sehingga dalam proses pemeriksaan, Hakim dalam pengadilan niaga dapat mengimplementasi pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tentang pembuktian sederhana.

Sehingga implikasi Yuridisnya ialah meskipun PT Merpati Airlines sebagai Debitor telah memenuhi keempat unsur yang merupakan adanya utang, adanya 2 kreditor dan adanya kondisi ketidakmampuan dimana dilihat bahwa PT.Merpati Airlines memiliki Utang sebesar Rp. 71.515.826.750 terhadap 112 karyawannya dan meskipun banyak karyawan telah mensomasi PT.Merpati Airlines. Namun apabila belum ada putusan dari Pengadilan hubungan industrial terhadap gaji dan normative lainnya yang menjadi utang tersebut, maka utang tersebut belum dapat dikatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga hakim tidak dapat memutuskan perkara pailit menggunakan pembuktian sederhana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penulis , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum dari pekerja PT.Merpati Airlines berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kepailitan yaitu adanya utang dalam ranah kepailitan ,adanya dua kreditur , adanya debitor, dan ditambah analisa Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tahun 2014, dan dengan adanya analisa pertimbangan hakim dalam Putusan No :41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst . Pemenuhan Prinsip *Structured Creditors* dimana pegawai sebagai kreditur preferen sesuai dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Dalam hal ini pekerja memiliki keabsahan / kapasitas hukum dalam melakukan permohonan pailit dalam pengadilan niaga. Dan terkhusus dalam kasus Merpati , bahwa pekerja PT.Merpati Airlines dapat mengajukannya dalam pengadilan niaga sebagai hubungan antara debitor dan kreditur , bukan sebagai pekerja dengan pengusaha.
2. Penyelesaian Hukum atas belum dibayarkannya upah pekerja PT.Merpati Airlines sesuai dengan pembuktian sederhana yang mana berkaca dari pertimbangan dan adanya putusan permohonan pekerja PT.Dirgantara , maka pekerja PT.Merpati Airlines tersebut harus melakukan upaya hukum terlebih dahulu melalui pengadilan hubungan industrial untuk mendapat putusan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4) yang memutuskan bahwa utang PT.Merpati Airlines tersebut telah jatuh tempo

dan dapat ditagih. Apabila telah adanya putusan dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4) terkait upah tersebut telah jatuh tempo , tidak ada sengketa ,dan dapat ditagih. Dengan itu pegawai PT.Merpati Airlines dapat mengajukan permohonan pailit dalam pengadilan niaga. Sehingga dalam proses pemeriksaan , Hakim dalam pengadilan niaga dapat mengimplementasi pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tentang pembuktian sederhana.

B. Saran

- Bagi Hakim sebagai pemegang tongkat keadilan , alangkah lebih baik apabila dalam pertimbangan hakim tersebut tidak menyertakan kebasahan kedudukan pegawai yang tidak sesuai dalam permohonan kedalam pengadilan niaga. Karena siapapun yang memiliki utang dan lebih dari satu pihak dapat melakukan permohonan dalam pailit pengadilan niaga. Sehingga tidak serta merta apabila hubungan pengusaha dan karyawannya harus diselesaikan dalam pengadilan hubungan industrial.
- Bagi Pegawai , untuk memperkuat unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengikutsertakan putusan P4 dalam permohonan pailit yang mana harus melalui melakukan penyelesaian hubungan industrial terlebih dahulu untuk menambah efisiensi dalam pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2009. **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadi Shubhan, 2008. **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hoff, Jerry. 2000., **Hukum Kepailitan di Indonesia** (*Indonesian Bankruptcy Law*), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi. Jakarta: Tata Nusa.
- Kartini Muljadi, 2001. “**Kepailitan dan Penyelesaian Utang-Piutang**” dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeni, S.H. 1993. “**Sejarah, Asas, dan teori Hukum Kepailitan** dalam Epstein, David G., Steve H. Nickles., James J. White, Bankruptcy, St. Paul, Minn: West Publishing Co; Radin, Max “The Nature of Bankruptcy”
- Ricardo Simanjuntak. 2005. “**Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan**” dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Rudhi Prasetya. 2007. **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), dalam Peter Mahmud, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo. 2000 **Lebih Jauh tentang Kepailitan**. Deltacitra Grafindo, Karawaci.
- R. Subekti. 1979. **Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat**, Pembimbing Masa, Jakarta,
- R. Subekti. 1995. **Pokok-Pokok Hukum Dagang**, Intermasa, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man. S. 2006. **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. cet. 1. Bandung: Alumni.

Shubhan, M. Hadi. 2014. **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**. Cet. 4. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, 2010. **Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, cet. 4, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Siti Anisah, 2008. **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia**, Total Media, Yogyakarta.

Solahuddin. 2008. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Visimedia, Jakarta.

Sunarmi. 2009. **Hukum Kepailitan**, USU Press, Medan.

Sutan Remy Sjahdeini. 2002. **Hukum Kepailitan**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Astiti, Sriti Hesti. 2015 “HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT.”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

DPR RI tanggal 22 September 2004, Risalah Resmi Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Mahkamah Agung, Putusan No. 477K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Pengadilan Negeri Jakarta Putusan No. 04/Pdt.Sus Pailit/2016/PN.Jkt.Pst)

JURNAL

Kadir, Yunita, 2014. *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1.

Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar , **KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN**

PEMBUKTIAN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN NO
:04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST) USU Law Journal,

INTERNET

Hukum Online , 13 September 2016 Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan>

Hukum Online , 5 Juni 2017 Yang Bisa Dilakukan Kreditor Jika Kepailitan

Ditolak Pengadilan

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58eb789a37a1c/yang-bisa-dilakukan-kreditor-jika-kepailitan-ditolak-pengadilan>

